

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara kesatuan republik Indonesia telah menerapkan otonomi daerah selama 15 tahun. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public juga didasarkan atas asas desentralisasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana kepada daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Oleh karena itu diperlukan system pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan efisien, efektif dan akuntabel. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan ( Halim,2017:231). Berkaitan dengan hal itu, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten merupakan

informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah kabupaten berhasil mengelola keuangan dengan baik, serta memberikan dampak yang positif. Analisis kinerja keuangan dalam APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi selain itu dapat pula dilakukan dengan cara menganalisis rasio – rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat peleyanan bagi masyarakat.

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakn untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas kinerja keuangan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Sucipto (2013) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran – ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam meneglola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Dari pengertian diatas dapat diatarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengasihkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik dengan mengandalkan sumber daya yang ada, suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standard dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ani dan Dwirandan mengenai kinerja keuangan daerah pada pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan, mendapatkan hasil bahwa kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio Efektifitas PAD, rasio efisiensi dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya antara kinerja keuangan terhadap pengangguran, menunjukan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan antara kinerja keuangan terhadap kemiskinan menunjukan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan Rasio Efektivitas PAD, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017-2020.

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 - 2020

Tahun	PAD	Pendapatan Perkapita
2017	Rp 699.883.898.612	Rp 4.824.755.79
2018	Rp 578.158.685.593	Rp 3.914.359.22
2019	Rp 846.630.735.624.26	Rp 5.685.290.60
2020	Rp 729.646.310.286.07	Rp 4.884.007.56

Sumber : laporan keuangan pemerintah Kab. Sumba Barat

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2017, pendapatan perkapita sebesar Rp 4.824.755.79, dan pada tahun 2018, menurun menjadi

Rp 3.914.359.22. tahun 2019 meningkat sebesar Rp 5.685.290.60 dan pada tahun 2020 menurun sebesar Rp 4.884.007.56.

Penelitian yang dilakukan oleh Kawa (2013). mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pasca pelaksanaan undang – undang otonomi daerah di kabupaten/kota di Indonesia mendapatkan hasil bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, an rasio efisiensi anggaran sebagai alat pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio keserasian belanja operasional dan modal sebagai alat pengukuran kinerja keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta memberikan bukti empiris bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012). Mengenai kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi utara dengan hasil yaitu kinerja keuangan dengan rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di perkotaan Sulawesi utara. Kinerja keuangan dengan rasio ketergantungan berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di perkotaan Sulawesi utara. Kineja keuangan dengan rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi utara berpengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten Sumba Barat tahun 2017 - 2020 ”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat”.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan pemerintah daerah dilihat dari Rasio Kemandirian ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Efektivitas ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Efisiensi ?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Belanja Modal ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio pertumbuhan ?

## **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Kemandirian.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Efektivitas.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Efisiensi.

4. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan dilihat dari Rasio pertumbuhan.

#### **1.4.2. Manfaat penelitian**

##### 1. Manfaat Akademik

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya mengetahui Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
- b. Dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas Ekonomi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen keuangan daerah.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

- a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan lebih memahami tentang analisis kinerja keuangan daerah kabupaten Sumba Barat.
- c. Sebagai informasi dan bahan masukan bagi pemerintah daerah Sumba Barat dalam melakukan inovasi.